

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui gambaran awal mengenai tema, objek dan metode penelitian. Penggunaan penelitian terdahulu pada penelitian ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dan metode analisisnya. Hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian empiris dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hasliani et al. (2021)	Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
2	Artisti & Fatria (2024)	Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah Provinsi Jawa Barat	Perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya
3	Wahyudi dan Hasri (2021)	Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa	Kualitas perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa
4	Entengo et al. (2023)	Pengaruh Implementasi Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa melalui Kompetensi SDM	Implementasi siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Kompetensi SDM memperkuat hubungan implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan

B. Kajian Teori

1. Implementasi Aplikasi Siskeudes

a. Aplikasi Siskeudes

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan (Malahika et al., 2018).

Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum desa yang meliputi nama dan jabatan kepala desa, nama dan jabatan sekretaris desa, nama dan jabatan kepala urusan keuangan, ibukota desa. Menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan untuk tidak dipertukarkan antara pemerintah daerah (Rivan dan Maksum, 2019).

Setelah melakukan pengisian data umum, tahap selanjutnya adalah data utama yang terbagi atas 4 kelompok yaitu modul perencanaan, modul penganggaran dan modul penatausahaan dan modul pembukuan. Setelah memasukkan data umum dan data utama tersebut, maka hasil atau output akhir dari aplikasi siskeudes tersebut adalah kompilasi data anggaran desa,

kompilasi data realisasi penatausahaan keuangan desa dan kompilasi data neraca desa. Rincian tentang data utama dalam aplikasi sistem keuangan desa menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2018) disampaikan pada uraian berikut:

1) Modul Perencanaan, modul perencanaan Siskeudes digunakan untuk memasukkan data perencanaan desa mulai dari Rencana strategi (Renstra) desa, RPJMDes dan RKPDes.

a. Renstra Desa Renstras desa untuk memasukkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDes.

b. RPJMDes dan RKPDes Menu ini bertujuan untuk memasukkan data RPJMDes dan RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDes.

2) Modul penganggaran yang digunakan untuk melakukan proses memasukkan data dalam rangka penyusunan APBDes. yaitu kelompok menu yang bertujuan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama adalah APBDes.

a. Data umum desa Dengan memasukkan data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama Sekretaris Desa dan Tanggal Perdes.

b. Bidang dan kegiatan Untuk penginputan data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode kegiatan, lokasi, nama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), output, dan pagu anggaran kegiatan.

c. Pendapatan dilakukan penginputan data anggaran pendapatan

pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya, dana desa, pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan hasil usaha desa lainnya.

d. Belanja Menu belanja digunakan untuk memasukkan data anggaran pemerintah desa. Memasukkan data belanja dilaksanakan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan desa seperti kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT.RW, dan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa.

e. Pembiayaan 1 Menu pembiayaan 1 bertujuan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan.

f. Pembiayaan 2 Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan input data pengeluaran keuangan dalam bentuk partisipasi modal BUMDES.

3) Modul penatausahaan, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes yang meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku administrasi keuangan desa. Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa.

a. Penatausahaan penerimaan Penerimaan dana desa dilakukan

dengan 2 cara yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang diterima melalui bank.

b. Penatausahaan pengeluaran Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja didesa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari (PTPKD). Pada aplikasi Siskeudes, SPP terdapat 3 kategori yaitu: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.

4) Modul pembukuan, terdapat menu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan dan triwulan).

b. Definisi Implementasi Aplikasi

Sebelum membahas tentang definisi implementasi aplikasi, satu hal yang perlu dipahami bahwa aplikasi dalam sistem keuangan publik adalah upaya untuk melakukan transparansi dan pengelolaan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, implementasi merupakan bentuk lain dari penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu unsur dari penerapan adalah adanya program

yang dilaksanakan (Martini et al., 2019).

Penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pada penerapan kebijakan yang telah diputuskan akan semakin berhasil dan sesuai dengan sasaran kebijakan manakala dilakukan oleh aktor-aktor birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan sumber daya dalam implementasi kebijakan publik (Puspasari dan Purnama, 2018).

Sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah lebih atas cenderung bersifat umum sebagai pedoman, arahan, dan panduan yang memberi wewenang kepada perangkat lebih bawah untuk melaksanakannya di lapangan dengan melakukan penjabaran-penjabaran lebih rinci sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapinya. Sehingga, suatu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah lebih atas, implementasinya akan efektif manakala pemerintah yang lebih bawah menaruh perhatian serius dan mampu secara cepat menerima, memahami serta selanjutnya merumuskan langkah-langkah strategis lebih lanjut baik dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang hasilnya dapat memberi perubahan pada aktivitas masyarakat (Pratiwi dan Pravasanti, 2020).

c. Indikator Implementasi Aplikasi

BPKP telah memperkenalkan sebuah sistem informasi keuangan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah terkhusus desa. Sebuah aplikasi yang disebut dengan Siskeudes. Menurut BPKP, (2016),

aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan ditahun 2015 dengan didukung oleh surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01- 16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Hasliani dan Yusuf (2021) menyatakan bahwa untuk mengukur implementasi aplikasi sistem keuangan desa terdiri dari beberapa indikator, yakni:

1) Kualitas sistem

Kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna

2) Penggunaan

Penggunaan terdiri dari dua item pengukuran, yaitu penggunaan harian dan frekwensi penggunaan

3) Kepuasan penggunaan

Kepuasan pengguna merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem. Sikap pengguna

terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan

4) Dampak individu

Dampak individu diartikan sebagai seberapa baik pegawai melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan, termasuk didalamnya inisiatif yang dimiliki, kemampuan dalam memecahkan masalah, kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan cara penggunaan sumber daya yang ada dan menyangkut energi yang diperlukan dalam pekerjaan.

Sedangkan dalam pengukuran implementasi aplikasi yang berdasarkan gambaran pengguna dapat menggunakan *Technology Acceptancen Model* (TAM) yang merupakan aspek penting untuk menganalisis faktor penerimaan sistem. Model penerimaan teknologi telah banyak digunakan di bidang teknologi informasi. Indikator dalam TAM menurut Rachman et al. (2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian pengguna, beberapa aspek yang termasuk dalam indikator penilaian pengguna adalah meliputi penilaian tentang tampilan yang menarik, aplikasi tersebut memiliki desain aplikasi yang sesuai dengan keinginan pengguna serta adanya fitur-fitur yang menarik.
- 2) Persepsi kemanfaatan (*perceived usefules*), pada indikator ini terdapat beberapa aspek yang meliputi keberadaan aplikasi yang membuat pekerjaan lebih mudah serta melalui keberadaan aplikasi tersebut bisa meningkatkan pembelajaran, atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa aplikasi tersebut memang berguna keberadaannya.

- 3) Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), beberapa aspek yang termasuk dalam indikator ini yaitu kemudahan untuk digunakan, jelas dan mudah dimengerti, serta aplikasi tersebut mudah dikelola.
- 4) Intensitas perilaku pengguna (*behavioral intention to use*), indikator tersebut menggunakan penilaian dari sisi pengguna yaitu ditandai dengan aplikasi tersebut yang menyenangkan, aplikasi tersebut diperlukan dalam membuat media pembelajaran, serta dampak aplikasi yang bisa memberikan kenyamanan pada pengguna.
- 5) Penggunaan sistem secara aktual (*actual system use*), pada indikator terakhir ini memiliki beberapa aspek yaitu tingkat kepuasan dalam menggunakan aplikasi tersebut serta waktu yang dihabiskan dalam menggunakan aplikasi.

2. Kualitas Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 ayat 10 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebut bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berdasarkan

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Sama halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan (Malahika et al., 2018).

Laporan keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya laporan keuangan desa tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan desa disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik maupun pemerintahan yang lain serta mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010.

b. Indikator Laporan Keuangan

Kualitas Laporan keuangan desa merupakan aspek penting karena laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan

untuk pembuatan keputusan. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Hasliani dan Yusuf (2021) kualitas laporan keuangan desa dapat diukur dengan menggunakan indikator, meliputi:

1) Relevan

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur, diantaranya manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*), dan lengkap.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, ialah penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna..

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Definisi Kompetensi SDM

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi aparatur desa. Kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Aulia, 2018).

Kompetensi merupakan hal yang berkaitan dengan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari kualitas dan kesempurnaan pengelolaan aparatur Negara khususnya pegawai negeri sipil. Penyediaan anggaran untuk pemberdayaan, serta peralatan, yang mendukungnya (Edison, 2016).

Terdapat beberapa karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem, selanjutnya Keterampilan yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian konsep diri dan nilai-nilai; yang merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia berhasil dalam suatu situasi. Selanjutnya yaitu karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. Kemudian berupa motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongandorongan lain yang memicu tindakan (Edison, 2016).

b. Indikator Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi yang tercermin dari hasil kinerja yang dilakukan melalui kemampuan yang dimiliki yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rohman (2016), Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan menggunakan indikator, meliputi:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan aspek (*knowledge*) atau pemahaman sistem pekerjaan oleh aparatur desa

2) Keterampilan (*skill*)

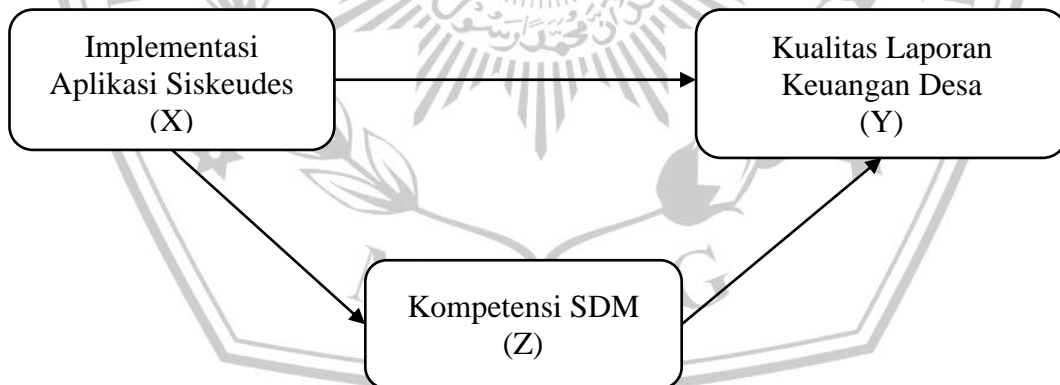
Keterampilan atau *skill* merupakan aspek yang dimiliki aparaturnya desa, baik keterampilan terkait penyelesaian pekerjaan serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan rekan kerja

3) Kemampuan (*ability*)

Ability atau kemampuan adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu untuk menyelesaikan berbagai tugas yang terkait dengan suatu pekerjaan. Kemampuan ini mencakup kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dijadikan acuan kerangka dasar untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dijabarkan pada Gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dijabarkan dalam penelitian sebelum melakukan penelitian, manfaat dari penulisan hipotesis yaitu nantinya akan bisa dibandingkan dengan hasil penelitian, penjabaran tentang hipotesis dalam

penelitian ini dijabarkan pada poin berikut.

1. Pengaruh Implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Kajian empiris atau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gayatri dan Latrini (2018) dengan besaran alpha 5% yang menunjukkan hasil bahwa penerapan Siskeudes efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Badung. Adanya pengaruh yang positif dari implementasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan tersebut dikarenakan aplikasi siskeudes versi 2.0 merupakan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengaruh dari implementasi aplikasi siskeudes 2.0 terhadap kualitas laporan keuangan desa juga bisa dilihat dari kualitas sistem yang digunakan dalam aplikasi siskeudes, melalui perangkat lunak yang bisa beroperasi secara *online* pada aplikasi siskeudes maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang relevan yaitu laporan keuangan yang tepat waktu dan lengkap karena kualitas aplikasi yang sudah mumpuni untuk input data.

Selain dari sisi kualitas sistem, adanya peran siskeudes dalam peningkatan laporan keuangan desa juga bisa dilihat dari sisi dampak individu yang dimiliki oleh pegawai aparatur desa dengan peningkatan efisiensi kerja karena dibantu oleh aplikasi maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang andal yakni laporan tersebut bisa diverifikasi. Hal ini sesuai dengan penyampaian dari Iqbal et al. (2022) bahwa implementasi aplikasi bisa berdampak pada efektivitas kinerja karyawan sehingga hasil pekerjaan

dari karyawan tersebut akan semakin optimal.

Salah satu teori rujukan tentang pentingnya perbaikan sistem pencatatan dalam laporan keuangan organisasi pemerintah yaitu oleh DeLone dan McLean (1992) dalam Puspasari dan Purnama (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas sistem maka semakin tinggi kualitas informasi yang akan tunjukkan. Merujuk dari penelitian terdahulu dan teori sistem informasi tersebut, maka hipotesis tentang pengaruh implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 terhadap kualitas laporan keuangan desa dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa

2. Pengaruh Implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0 terhadap Kompetensi SDM

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes 2.0) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa. Agar dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal, aparat desa harus memahami dan menguasai berbagai fungsi dan fitur yang tersedia. Proses ini sering kali disertai dengan pelatihan dan pendampingan teknis yang secara langsung meningkatkan kompetensi teknis para pengguna. Selain itu, keharusan untuk selalu memperbarui data keuangan secara tepat waktu dan akurat juga mengasah keterampilan manajerial dan disiplin kerja mereka. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Artisti & Fatria (2024) pada Dinas Perumahan dan

Pemukiman Daerah Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan efisiensi kerja, akurasi dalam pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk mengolah serta menganalisis data dengan lebih efektif.

Pada konteks aplikasi Siskeudes, hipotesis ini dapat ditarik kesamaan dengan temuan bahwa teknologi keuangan memungkinkan aparat desa untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan kompetensi teknis dalam pengoperasian perangkat lunak, serta memperkuat keterampilan analitis dalam menyusun dan menilai laporan keuangan. Sehingga, baik dalam kasus Dinas Perumahan dan Pemukiman maupun penggunaan Siskeudes 2.0, teknologi terbukti sebagai pendorong penting untuk meningkatkan kompetensi SDM, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Merujuk dari hasil penelitian terdahulu oleh Artisti & Fatria (2024) tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2 : Implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0 berpengaruh terhadap Kompetensi SDM

3. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Hipotesis tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan desa dalam penelitian ini merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iqbal et al. (2022) yang menggunakan alpha sebesar 5% menghasilkan temuan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Adanya peran dari kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa juga bisa disebabkan dari aspek pengetahuan aparatur tersebut, melalui pengetahuan yang memadai terhadap penyusunan laporan keuangan maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, hal ini karena penempatan pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan juga bisa dilihat dari aspek keterampilan (*skill*) yang dimiliki pegawai yang bisa berdampak positif pada kualitas laporan yang andal, hal ini karena dengan *skill* atau kemampuan dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan desa yang andal yaitu laporan keuangan yang lengkap. Hal ini sesuai dengan penyampaian dari Wahyudi dan Hasri (2021) yang menyatakan bahwa kualitas SDM bisa dilihat dari aspek keterampilan yang dimiliki aparatur desa, dengan adanya keterampilan yang mumpuni dari aparatur desa tersebut maka akan berdampak pada ketelitian dan relevansi laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian tersebut juga berhubungan dengan teori kompetensi yang disampaikan oleh Hutapea dan Thoha (2008) dalam Djaharuddin (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki dampak yang besar terhadap output pekerjaannya, namun kompetensi harus ditingkatkan untuk menjawab tantangan, beberapa cara peningkatan kompetensi yaitu melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap. Merujuk dari hasil penelitian terdahulu dan teori kompetensi tersebut, maka hipotesis tentang pengaruh kompetensi

SDM terhadap kualitas laporan keuangan desa dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa

4. Kompetensi SDM dalam Memediasi Pengaruh Implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini merupakan hipotesis terkait dengan variabel mediasi yang digunakan yaitu kompetensi SDM dalam memberikan efek mediasi pada pengaruh langsung dari variabel implementasi aplikasi siskeudes 2.0 terhadap kualitas laporan keuangan desa. Adanya kemampuan variabel kompetensi SDM dalam memediasi pengaruh dari implementasi aplikasi siskeudes 2.0 terhadap kualitas laporan keuangan desa diketahui dari kajian empiris yang dilakukan oleh Puspasari dan Purnama (2018) dengan taraf signifikansi (α) 5% yang menghasilkan temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan dalam memediasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian tersebut menandakan bahwa kompetensi SDM memediasi pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.

Peran mediasi dari kompetensi SDM dalam memediasi pengaruh dari implementasi aplikasi siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari sisi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur pemerintah desa, melalui pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi siskeudes yang berbasis komputer, sehingga dengan kemampuan

tersebut akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Selain kemudahan yang dirasakan oleh aparatur desa dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni dalam bidang penggunaan komputer tersebut, aspek lain yang bisa meningkat juga dari sisi kualitas laporan keuangan yang andal karena laporan keuangan tersebut bisa diverifikasi sumber nya dan memiliki dokumen yang lengkap. Hal ini berhubungan dengan penyampaian dari Wardani dan Andriyani (2017) bahwa kualitas SDM yang terampil bisa dilihat dari kemampuan pemanfaatan teknologi informasi serta dampaknya terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Hasil penelitian tersebut berhubungan dengan teori kompetensi *auditing* yang disampaikan oleh Guy (2003) bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Sehingga dengan adanya kompetensi yang mumpuni dari suatu SDM maka akan memiliki peran besar dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang akhirnya bisa menerapkan aplikasi tersebut dengan baik dan mampu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia memediasi Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Versi 2.0 (Siskeudes versi 2.0) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa